

# IMPLEMENTASI SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN (SKKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN DINI PADA KANTOR SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKTOR III MENTENG JAKARTA PUSAT

<sup>1</sup>Tono, <sup>2</sup>Dwi Agustina, <sup>3</sup>Eka Rofiyanti

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email : <sup>1</sup>tono.fire113@gmail.com, <sup>2</sup>dwiagustina1808@gmail.com, <sup>3</sup>rofiyanti.ekasumarno@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords

Implementasi ,Sistem  
Ketahanan Kebakaran  
Lingkungan Sebagai  
Upaya Pencegahan  
Kebakaran Dini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelatihan sistem ketahanan kebakaran lingkungan pada kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi dan Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implemementasi sistem ketahanan kebakaran lingkungan sebagai upaya pencegahan dini telah berjalan sebagaimana mestinya, implelentasi yang dilakukan mengacu pada teori **Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam** Nugroho, (2011:286) atas implemtasi yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, lingkungan sosial masyarakat dengan mengimplementasikan SKKL sebagai bentuk program kerja yang telah di canangkan oleh Kantor Gulkarmart Provinsi DKI melalui kantor Sektor yang berada di wilayah Kecamatan-Kecamatan, di samping itu tedapat beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan seperti: Kurangnya Sumberdaya masyarakat yang ikut menjadi tenaga sukarela, kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk itu solusi dalam menanggulangi hambatan dan kenadalanya adalah: Berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi, peran srta masyarakat, focus pada peningkatan keikutsertakan masyarakat yang dengan sukarela mengikuti pembekalan, dan pelatihan SKK. Dan Upaya pencegahan peristiwa bencana kebakaran dini meliputi: Menghindari penggunaan bahan material yang mudah terbakar, dengan mematikan aliran listrik secepatnya bilamana terjadi korsleting listrik, hidari pemakaian colokan listrik yang berlebihan, matikan kompor gas bilamana akan meninggalkan ruang masak dan tidak panik bila terjadi peristiwa bencana kebakaran

## PENDAHULUAN

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, yang artinya kebakaran itu di luar kemampuan dan keinginan manusia. Menurut teori segi tiga api (*Fire Triangle*) Kebakaran terjadi karena adanya 3 (tiga) faktor yang menjadi unsur api yaitu bahan bakar (*fuel*), sumber panas (*heat*) dan oksigen (Ramli, 2010:27). Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi di lingkungan kita.

Kebakaran terjadi akibat bertemunya 3 unsur yaitu bahan yang dapat terbakar, suhu penyalaan atau titik nyala dan zat pembakar (O<sub>2</sub> atau udara). Untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan mencegah bertemunya salah satu dari dua unsur lainnya. Saat ini, masalah kebakaran bukan saja merupakan masalah pribadi, akan tetapi sudah merupakan masalah secara umum timbulnya kebakaran akhir-akhir ini yang selain disebabkan oleh karena peledakan kompor, listrik, dan kelengahan-kelengahan lainnya, juga dapat merupakan usaha subversi yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat banyak, Kerugian akibat musibah kebakaran di dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami musibah kebakaran dengan kerugian besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus kebakaran perlu adanya pengetahuan oleh setiap individu dan masyarakat tentang kebakaran dan bagaimana cara mencegah menghadapi dan menanggulangi adanya kebakaran.

Pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, melanjutkan implementasi program SKKL yang di laksanakan di wilayah masing-masing dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar, membangun kebersamaan dengan satuan dan barisan Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan yang lebih utama adalah membina dan membangun kekompakan satuan Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran dengan tidak memilah dan memilih Sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta, disebutkan dalam Pasal 2 Bab II mengenai Pencegahan Umum bahwa setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan umum. Di wilayah DKI Jakarta, dalam ketentuan Perda tersebut, disebutkan, dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat, terbentuknya Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran merupakan awal dari upaya pencegahan kebakaran dini.

Dalam setiap lingkungan di perumahan dalam suatu perkampungan dan bangunan perumahan sederhana, ditunjuk dan ditetapkan seorang Komandan Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran. Selanjutnya, Komandan SKKL bertanggungjawab atas pembentukan Kesatuan SKKL pada lingkungan masing-masing dalam pelaksanaan program lainnya. Peran Sistem Ketahanan Lingkungan Kebakaran dalam Perda tersebut, memang tampak ideal, sebagai bentuk kewajiban masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran dini yang sering terjadi di wilayah DKI Jakarta khususnya di wilayah Menteng.

Anggota masyarakat secara keseluruhan, menjadi komponen lainnya, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Terutama dalam aspek pencegahan. Setiap anggota masyarakat, sesuai ketentuan Perda No 8 tahun 2008, berkewajiban bertanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Hal ini berarti, peran masyarakat itu menyeluruh, sejak pencegahan, sampai upaya pemadaman. Masyarakat merupakan *stakeholder* dari kebakaran itu sendiri seharusnya memiliki tingkat kesiapsiagaan dan upaya lain yang dapat mereduksi berbagai kerugian dari bencana kebakaran yang terjadi. Huang dalam Sagala (2014:1) mengemukakan bahwa: Salah satu kejadian kebakaran yang paling merugikan adalah kejadian kebakaran di daerah perkotaan atau permukiman. Kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mitigasi bencana kebakaran, maka peneliti hendak mengkaji tentang kedua hal tersebut dalam upaya pencegahan bencana kebakaran pada wilayah padat penduduk yang ada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, memberikan dorongan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam dan lebih fokus pada kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dalam penelian ini dan lebih mengerucut serta fokus peneliti mencoba dengan mengambil Judul: **“Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat”**.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi dengan Fokus pada penelitian dengan tujuan lebih mengerucut pada Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini Pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisa implementasi sistem ketahanan kebakaran (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Untuk menganalisa hambatan atas implementasi sistem ketahanan kebakaran (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Untuk menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan atas implementasi sistem ketahanan kebakaran (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Administrasi Publik**

#### **Pengertian Adminstrasi**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan administrasi. Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan. Secara etimologi istilah administarsi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang bentuk *infinitifnya to administer*. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, kata *to admister* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang). Menurut Suprayogi “Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama”. (Suprayogi, 2011:2).

### **Api Dan Kebakaran**

#### **Pengertian Tentang Api**

Api adalah suatu reaksi kimia yang diikuti oleh evolusi atau pengeluaran cahaya dan panas. Reaksi kimia mengandung pengertian adanya proses yang berlangsung secara kimia. Terjadinya api atau kebakaran disebabkan bergabungnya tiga unsur seperti bahan bakar, panas dan oksigen. Menurut Farha, (2010:27) Bahan bakar adalah suatu bahan yang mudah terbakar, yang secara fisik terbagi atas :

1. Bahan bakar gas : asetilen, metana, hidrokarbon, dll.
2. Bahan bakar cair : kerosin, minyak tanah, bensin, dll.
3. Bahan bakar padat : kayu, kertas, batu bara, logam, karet, dll

#### **Pengertian Tentang Kebakaran**

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia yang pada umumnya merugikan (Soehatman Ramli, 2010:16). Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, yang berarti diluar kemampuan dan keinginan manusia. Api tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dengan oksigen dan bantuan panas. Teori ini dikenal sebagai segitiga api (*fire triangle*). Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, pada umumnya sukar dikendalikan (Perda DKI, Nomor 8 Tahun 2008). Kebakaran adalah suatu nyala api atau bencana yang tidak dikehendaki bersama, karena dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat.

### a. **Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Lester dan Stewart *dalam* Kusumanegara (2010:97) implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses perumusan dan perencanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) mendefinisikan bahwa :  
“Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan program sebelumnya”.

Cleaves yang dikutip (*dalam* Wahab 2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Subarsono, (2011:99) dengan menyatakan implementasi pelaksanaan program sebagai berikut: “Hingga derajat yang paling besar bila dibandingkan dengan sistem-sistem politik di Amerika Serikat Dan Eropa Barat, proses implementasi pelaksanaan program dinegara-negara Asia, Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah merupakan pusat partisipasi politik dan persaingan politik”.

### **Kerangka Pemikiran**

Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) merupakan suatu program yang dibentuk oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan tujuan dapat mengatasi atau mencegah terjadinya peristiwa kebakaran atau dengan kata lain bahwa pencegahan kebakaran dapat di tanggulangi sejak dini sebelum petugas pemadam kebakaran datang artinya masyarakat dapat menanggulangi secara bersama-sama dan atas kesadaran diri untuk ikut menanggulangi bencana kebakaran diwilayahnya masing-masing. Di perlukan kesigapan dan kecepatan masyarakat dalam melakukan penanganannya, sepuluh detik saja terjadi peristiwa bencana kebakaran, bilamana tidak di ambil tindakan penanganan dengan cepat (pencegahan dini) maka akan dapat menghancurkan beberapa rumah di sekitarnya kalau masyarakat menunggu petugas pemadam datang. Untuk itu dengan adanya implementasi SKKL dalam bentuk keikut sertaan masyarakat maka akan dengan mudah peristiwa bencana kebakaran dini dapat di cegah.

Untuk itu masyarakat perlunya pembekalan dan pengetahuan serta adanya pelatihan penanggulangan pemadaman kebakaran masyarakat tidak perlu panik, masyarakat akan berfikir dengan jernih bertindak berdasarkan naluri dari pembekalan dan pengetahuan dan bentuk pelatihan yang didapat ditambah dengan sarana air dengan pemasangan berbagai titik hydrant air di lingkungan maka api kebakaran tidak akan meluas ke pemukiman warga dengan cepat. Kerangka berfikir dalam penelitian ini seperti apa yang terungkap dalam Implementasi berdasarkan teori **Donald S. Van Meter dan Carl E.**

**Van Horn** (*dalam* Nugroho, 2011:286). Adapun model dalam implementasi, **terdapat 6 (enam) variabel yakni:**

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

### **Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater *dalam* Nugroho, (2011:286) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Proses penransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya

### Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) yakni: "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

### Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Upaya masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa bencana kebakaran dini adalah dengan telah mengikuti beberapa pembekalan, pemahaman, pengetahuan dan pelatihan SKKL yang dapat di terapkan di lapangan, memberikan ilmu yang di dapat setelah pembekalan, pemahaman, pengetahuan dan pelatihan SKKL kepada warga masyarakat lainnya, mengajak warga masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana dengan komunikasi dan sosialisasi akan pencegahan sebelum terjadinya bencana peristiwa kebakaran seperti: jauhkan anak-anak dari api, pemasangan listrik yang berlebihan atau stop kontak jangan mencolokkan lebih dai satu, hindari bahan yanga mudah terbakar, cabut panel listrik bilamana akan bepergian, matikan kompor setelah di pergunakan, jangan tinggalkan kompor yang masih menyala meskipun hanya sebentar dan lain sebagainya.

### METODE PENELITIAN

#### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tono, Dwi A, Eka R (*Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran ...*)

### **Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Menurut Sukmadinata (2011:73), mengemukakan pendapatnya bahwa: “Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan”.

Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah yaitu obyek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti memasuki obyek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Sedangkan menurut Satori dan Aan (2010:22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, menurut cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh organisasi yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Secara umum, teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang memungkinkan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif juga merupakan tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematis untuk membangun kaitan antar data penelitian dalam upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **Uji Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (*dalam* Lexy J. Moleong, 2012:330), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi wawancara disesuaikan dengan keinginan dari *key informant*, yang dalam hal ini berada di kantor dan tempat tinggal dari *key informant*, adapun objek penelitian dititik beratkan pada Implementasi sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) dalam upaya pencegahan kebakaran dini pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### Gambaran Objek Penelitian

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Dibentuknya organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ini merupakan perwujudan tanggung jawab Pemda DKI dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Dalam mewujudkan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada warga kota tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 9 tahun 2002, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta, Mempunyai 3 tugas pokok, yakni:

1. Pencegahan Kebakaran.
2. Pemadaman Kebakaran, dan
3. Penyelamatan Jiwa dan ancaman kebakaran dan bencana lain, untuk lebih mengenali tentang sosok atau profil Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta

## **PEMBAHASAN**

Kejadian bencana merupakan salah satu bentuk terhadap masyarakat yang mulai meningkat frekuensi kejadiannya saat ini. Bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini merupakan tantangan dan risiko yang harus dihadapi serta perlu diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan salah satu bentuk kepedulian warga masyarakat atas wilayahnya, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat di butuhkan guna perlindungan dini dalam mengantisipasi peristiwa bencana kebakaran.

Secara eksternal, kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, juga masih menghadapi beberapa persoalan yang kerap mengganggu kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya meliputi sistem komunikasi yang sering terganggu dengan adanya pemancar yang di pergunakan masyarakat seperti orari dan intercom karena keberadaannya mengganggu signal HT yang di miliki Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selain itu untuk lebih meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, mengelompokan masyarakat ke dalam 5 kelompok atau komunitas, yakni:

1. Komunitas Pemukiman,
2. Komunitas, Bangunan Umum dan Komersial,
3. Komunitas Pendidikan,
4. Komunitas, Organisasi Kemasyarakatan atau Asosiasi Profesi,
5. Komunitas Kawasan Khusus.

Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat pun telah memberikan bantuan peralatan berupa pompa portabel, dan alat pemadam api ringan (Apar). Sedangkan untuk memudahkan komunikasi, DPK juga telah memasang alarm kebakaran sampai tingkat RW berikut HT alat komunikasi lainnya. Hingga kini sudah terpasang 700 unit alarm yang terpasang terutama di tempat-tempat rawan kebakaran. Dan pada tahun 2017 dipasang tambahan baru pada 600-an titik lokasi. Sedangkan mengenai hydran, hingga kini memang baru ada sekitar 1.000 hydran, yang tidak semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, untuk wilayah Jakarta Pusat, dibutuhkan setidaknya 20.000 unit hydran dalam kondisi siap pakai. Harapannya dengan terlaksananya implementasi SKKL masyarakat di lingkungan RW dan Rt diwilayah Kecamatan Menteng

Jakarta Pusat dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta dari masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dini. Hanya saja suksesnya program tersebut tentu perlu adanya keterlibatan instansi terkait seperti lurah dan jajarannya, anggota dewan kelurahan dan pemuka masyarakat. Agar proses implementasi sampai kepada masyarakat hingga adanya kepedulian dan tanggung jawab dari masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran dini dan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) dapat berjalan dengan baik perlunya partisipasi masyarakat yang benar-benar sadar akan perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu pihak kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah secara maksimal melaksanakan implementasi program sistem ketahanan kebakaran lingkungan di wilayahnya. Dalam penelitian ini penulis membahas atas beberapa dari pertanyaan penelitian yang meliputi:

### **1) Implementasi sistem ketahanan kebakaran (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat**

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu.

#### **Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

#### **Komunikasi Antar Organisasi**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater *dalam* Nugroho, (2011:286) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*).

Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

### **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) yakni: "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn *dalam* Nugroho, (2011:286) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

### **Hambatan dan kendala yang dihadapi atas implementasi sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Suku Dinas Penganggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah :**

- a. Kurangnya sumber daya masyarakat akan pentingnya SKKL di wilayah Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Tidak adanya komunikasi yang baik antara pengagas dengan masyarakat dalam mengikuti SKKL dan pentingnya keikutsertaan masyarakat guna kesiapsiagaan masyarakat bilamana terjadinya peristiwa bencana kebakaran

### **Solusi yang dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan implementasi SKKL sebagai upaya pencegahan dini pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah:**

1. Berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti dengan mengikuti pelatihan SKKL
2. Berupaya untuk peningkatan kepedulian, tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan ide kreatif dan inisiatif-inisiatif yang bersifat membangun
3. Fokus pada peningkatan keikutsertaan masyarakat yang dengan sukarela mengikuti pembekalan, pemahaman, pengetahuan dan pelatihan SKKL untuk ikut serta bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya

**4). Upaya pencegahan peristiwa bencana kebakaran dini di wilayah kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni :**

- a. Menghindari penggunaan bahan material yang mudah terbakar
- b. Dengan mematikan aliran listrik secepatnya bilamana terjadi korsleting listrik
- c. Hindari pemakain colokan listrik yang berlebihan
- d. Matikan kompor gas bilamana akan meninggalkan ruang masak
- e. Tidak panik bila terjadi peristiwa bencana kebakaran dini
- f. Memanfaatkan segala daya dan upaya yang ada untuk mencegah peristiwa bencana kebakaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Bedasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan :

**Implementasi sistem ketahanan kebakaran (SKKL) sebagai upaya pencegahan kebakaran dini pada Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Menteng Jakarta Pusat, yakni :**

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan, yakni : Keberhasilan atas kebijakan yang telah dibuat atau Kegagalan atas kebijakan yang, Kurang menyadari standar kebijakan diperlukan kajian yang tepat pada sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya, yakni : diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi implementor dan memahami sumber daya finansial;
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana, yakni : Implementasi dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagai respon internal dan Fragmentasi serta adanya Interaksi untuk mencapai tujuan sasaran kebijakan;

**Hambatan yang dihadapi atas Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini pada Penganggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Jakarta Pusat adalah:**

- a. Kurangnya sumber daya masyarakat akan pentingnya SKKL di wilayah Sektor III Kecamatan Menteng Jakarta Pusat,
- b. Tidak adanya Komunikasi yang baik antara pengagas dengan masyarakat dalam mengikuti SKKL dan pentingnya keikutsertaan masyarakat guna kesiapsiagaan masyarakat bilamana terjadinya peristiwa bencana kebakaran
- c. Kurangnya Kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat akan wilayahnya bilamana terjadi peristiwa kebakaran, sehingga warga akan panik dan binggung, karena tidak mau mengikuti SKKL di wilayah Sektor III Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

**Solusi dalam mengatasi hambatan atas implementasi SKKL sebagai upaya pencegahan dini pada Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Jakarta Pusat adalah:**

- a. Berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti dengan mengikuti pelatihan SKKL
- b. Berupaya untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan ide kreatif dan inisiatif-inisiatif yang bersifat membangun
- c. Fokus pada peningkatan keikutsertakan masyarakat yang dengan sukarela mengikuti pembekjalan, pemahaman, pengetahuan dan pelatihan SKKL untuk ikutserta bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya

**Upaya pencegahan peristiwa bencana kebakaran dini di wilayah kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni :**

- d. Dengan mematikan aliran listrik secepatnya bilamana terjadi korsleting listrik;
- e. Memanfaatkan segala daya dan upaya yang ada untuk mencegah peristiwa bencana kebakaran.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran bagi kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yaitu:

1. Hendaknya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat frekwensinya lebih di tingkatkan secara berkala dan terus menerus yang dilakukan oleh petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Perlunya penambahan peserta SKKL dari masing-masing Kelurahan agar pencegahan kebakaran dini dapat di cegah lebih awal di wilayah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Wajib berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda dengan pimpinan Kelurahan-kelurahan berikut para stafnya yang berada di wilayah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor III Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku:**

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta.
- Adi Nugroho. 2011 "Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data". Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Abdul Wahab, Solichin 2008. Pengantar Analisis Penerapan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Penerapan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Cahyononim dan Sutan Mohammad Zain 2010. *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Penerapan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Creswell, J., W., 2012. *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*; Cetakan Ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David H. Rosenbloom 2005. *Publik Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the P{ublik Sector: 6<sup>th</sup> Edition, New York: Mc Graw-Hill*.
- Dimock dan Dimock. 1992. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy, Congressional*. Quarterly Press, Washington
- Farhan Rizki Yudistira. 2010. *Rancang Bangun Dapur Kowi Pelebur Aluminium Berbahan Bakar Digital Library*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Hackelford, Ray. 2008. *Fire Behavior and Combustion Processes 1st Edition*. Delmar Cengage Learning.
- Irawan, Prasetya, 2010. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pfiffner, John dan Presthus, Robert V, 1960. *Public Administration*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Proteksi Sistem Kebakaran*. FKM. UI.
- Rati Fatmawati 2009. *Fire and Emergency Response. Preparedness*. FKM. UI.
- Sagala S, 2014.. *Perilaku dan Kesiapsiagaan Terkait Kebakaran Pada Penghuni Pemukiman Padat Kota Bandung*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4799/FG-1.pdf> sequence = 3 & is Allowed = y. Dikutip tanggal 10 Maret 2017 pukul 10:30.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukma, 2012. *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ugi Suprayogi. (2011) *Konsep Dan Teori Administrasi* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo 1974. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.

#### **Jurnal:**

- \_\_\_\_\_ Charisma Puspita Sari (2016) dengan judul: *Evaluasi Penerapan Sarana Proteksi Aktif Pencegahan Kebakaran Di Hotel Graha Agung Semarang Tahun 2015*.
- \_\_\_\_\_ Yusran Nasution (2012) Jurnal Vol 6 Nomor 4 Februari 2012 Dengan Judul *Mitigasi Kebakaran Melalui Masyarakat Upaya dini pencegahan kebakaran menurunkan resiko kecelakaan di lingkungan permukiman padat perkotaan*.
- \_\_\_\_\_ Yusran Nasution (2015) Judul: *Mitigasi kebakaran melalui masyarakat pada kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta*.

#### **Perundang-Undangan:**

- \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 *Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta*.
- \_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor: 56/PRP/1960 yakni *kawasan dengan kepadatan penduduk yang minimal termasuk pada kelompok cukup padat dan sangat padat sesuai dengan pembagian kelompok kepadatan penduduk*.
- \_\_\_\_\_ Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/mMEN/1980, *Alat pemadam api ringan*.